



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/111 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/026 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/078 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 882/9728/002/23300/AZ/12/21 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Ir. YUNI ASTUTI, MA NIP. 196206211987092001, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/078 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/078 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/026 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/111 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 911/026 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|--|--|---|
| 1 | SUMARNO, SE, MM NIP. 19700514 199202 1 001 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | - PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG - PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SPJ | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> |
| 2 | RACHMAT SUSILO, S.Kom NIP. 19830121 200801 1 003 Staf Sub bag Keuangan pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah | - BENDAHARA PENGELUARAN | |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|--|
| | | | <p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Hukum) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Adm Bangsa) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Perekonomian) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Kesra) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Organisasi) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Umum) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Hukum) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Adm Bangsa) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Perekonomian)</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|---|
| | | | <p> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Kesra) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Organisasi) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Umum) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Pemerintahan,Otonomi Daerah Dan Kerja Sama) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD </p> <p> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya </p> <p> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor </p> <p> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya </p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|--|
| | | | <p>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</p> <p>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Penyiapan Materi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</p> <p>Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</p> <p>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</p> <p>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Penataan Analisis Jabatan</p> <p>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|---|
| | | | <p>Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</p> <p>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Fasilitasi Penataan Wilayah</p> <p>Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</p> <p>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|---|
| | | | <p>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> <p>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</p> <p>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</p> <p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|---|
| | | | <p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan</p> <p>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <p>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</p> <p>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|---|---|---|
| 2 | AGUS FIKRI CAHYADI NIP. 19730403 200701 1 117 Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah | - BENDAHARA PENERIMAAN | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah |
| 3 | a. BIRO UMUM MOH WACHJU ALAMSYAH, SH NIP. 19680505 199703 1 007 Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah | - PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|--|
| | | | <p>Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|---|---|---|
| | | | <p>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</p> <p>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan Penyiapan Materi Pimpinan Fasilitas Komunikasi Pimpinan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</p> <p>Fasilitas Keprotokolan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</p> |
| | <p>b. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA DADANG SOMANTRI, ATD, MT NIP. 19650622 198703 1 007 Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah</p> <p>ANDRI AGUS WIHARJA NIP. 19800620 199903 1 001 Staf pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|---|--|---|
| | <p>c. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA NIP. 19710909 199603 1 006 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah</p> <p>ADINDA MUTIARA FIRDAYANTI, S.IP NIP. 19940330 201609 2 001 Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</p> <p>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</p> <p>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</p> |
| | <p>d. BIRO HUKUM</p> <p>IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum NIP. 19711207 199503 1 003 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</p> <p>IRA KUSUMA DEWI, SH NIP. 19830810 200604 2 007 Staf Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|---|--|--|
| | | | <p>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</p> |
| | <p>e. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Drs. IMAM MASKUR, M.Si NIP. 19690512 199401 1 001 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah</p> <p>JOKO YULIANTO, A.Md NIP. 19770705 201001 1 014 Staf Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|---|--|--|
| | | | <p>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> |
| | <p>f. BIRO ORGANISASI Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM NIP. 19641104 198903 1 013 Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah</p> <p>INDRIATMO, SE NIP. 19800522 199903 1 003 Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</p> <p>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Penataan Analisis Jabatan</p> <p>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|--|--|---|
| | <p>g. BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si NIP. 19680517 198908 1 002 Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah</p> <p>ANIENDA CITRA DEWAYANI, S.STP NIP. 19920613 201406 2 001 Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</p> <p>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Fasilitasi Penataan Wilayah</p> <p>Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</p> |
| | <p>h. BIRO PEREKONOMIAN DAERAH EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM NIP. 19660611 198602 1 001 Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|---|--|---|
| | <p>TANJUNG KURNIAWAN , SH NIP. 19811208 200604 1 009 Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</p> <p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLU dan Evaluasi Kebijakan</p> |
| | <p>i. BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH NIP. 19670721198603 1 004 Plt. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>GINANJAR AVRI ADIASTANTO, A.Md NIP. 19840421 201101 1 010 Staf pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa</p> | <p>- PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG</p> <p>- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> | <p>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> |

| NO | NAMA / NIP / JABATAN | KEDUDUKAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|----|----------------------|-----------|---|
| | | | <p>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO